

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar

The Role of the Dinas Sosial in Handling Beggars at Makassar City

Nur Aprilyanti, Muh Nur Yamin, Andi Cudai Nur

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Makassar

Email: Cudainur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pengemis di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar kurang berperan, dapat dilihat dari tiga indikator peran menurut Gede Diva yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator belum berperan, sebagai regulator belum berperan dan sebagai katalisator sudah berperan. Berdasarkan hasil penelitian, dua dari tiga indikator belum berperan maksimal dalam penanganan pengemis. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas berupa panti rehabilitasi lanjutan untuk para pengemis mendapatkan pembinaan serta kurangnya pelatihan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis. Adapun faktor internal maraknya pengemis di Kota Makassar yaitu merantau dengan modal nekad, malas berusaha, dan disabilitas fisik/cacat fisik sedangkan faktor eksternalnya yaitu tidak adanya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan serta terlilit masalah ekonomi yang akut.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Sosial, Penanggulangan Kemiskinan*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Dinas Sosial in Handling Beggars at Makassar City and the factors that influence the rise of beggars at Makassar City. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the Dinas Sosial in handling beggars at Makassar City is less effective, this can be seen from the three role indicators according to Gede Diva, namely the government has not acted as a facilitator, has not acted as a regulator and has acted as a catalyst. Based on the results of the study, two of the three indicators have not played a maximum role in handling beggars. This is due to the unavailability of facilities in the form of advanced rehabilitation homes for beggars to receive guidance and the lack of skills training provided by the Dinas Sosial of Makassar City to beggars. The internal factors of the rise of beggars at Makassar City are migrating with desperate capital, lazy to do business, and physical disabilities while the external factors are the absence of jobs, expensive prices of basic necessities, poverty and acute economic problems.

Keywords : *Role, Dinas Sosial, Handling Beggars*

PENDAHULUAN

Kesenjangan Sosial dan kemiskinan adalah sebuah masalah utama dari pembangunan. Menurut Murdani & Hadromi (2019), “Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangkaian pembinaan”. Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah lebih baik serta memberikan dampak yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat apabila hal ini terjadi, pembangunan akan terhambat dan tidak mustahil akan memberikan dampak atau perubahan ke arah yang lebih buruk dari sekarang.

Mustafa (2021) mengatakan bahwa pengemis merupakan salah satu dampak dari tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi pengemis karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi pengemis karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

Terkait hal ini, pemerintah Makassar memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dengan isi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Perda ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini. Namun pada kenyataannya jumlah pengemis terkhusus pada Kota Makassar semakin hari semakin bertambah jumlahnya bahkan pada segelintir orang sudah menjadikan pengemis sebagai suatu profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya peranan pemerintah dalam penanganan pengemis ini masi terbilang belum maksimal menangani persoalan pengemis di Kota Makassar.

Dilansir oleh Beritaranews.com (diakses pada tahun 2020), pengemis (gepeng) semakin marak saja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Komisi DPRD Kota Makassar pun mendesak Dinas Sosial untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Serta berdasarkan pengamatan penulis sendiri terkhusus di daerah perempatan lampu merah Abdullah Dg. Sirua yang sebelumnya tidak pernah dijumpai adanya pengemis di daerah tersebut tetapi pada saat ini sangat banyak dijumpai pengemis di persimpangan lampu merah tersebut dan mayoritas adalah anak kecil.

Tabel 1. Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah
1	2018	107
2	2019	68
3	2020	138

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berhasil terjaring patroli oleh petugas Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Makassar di tahun 2018 mengalami penurunan di tahun 2019 akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditahun berikutnya antara 2019 yaitu sebanyak 68 orang ke 2020 sebanyak 138 orang ini berarti upaya atau peranan pemerintah dalam menangani masalah pengemis ini masih belum berjalan dengan maksimal.

Penanganan pengemis, adalah masalah serius yang harus dihadapi oleh semua pihak, Lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah (LSM) wilayah Kota Makassar dan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan komunitasnya. Sehingga untuk menangani hal tersebut, pemerintah mengerahkan satuan polisi pamong praja dan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menertibkan dan bahkan mengusir para gelandangan dan pengemis.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah terkhusus dinas sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada pengemis, tetapi belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Dari berbagai permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti tentang **“Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar”**.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Fokus penelitian diarahkan pada peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar dan apa saja faktor – faktor penyebab maraknya pengemis di Kota Makassar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar sebagai berikut :

Peran sebagai fasilitator

Peran pemerintah yang pertama menurut Gede Diva ialah peran sebagai fasilitator. Fasilitator berasal dari kata fatalis yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk mencapai target yang ingin dituju. Sedangkan fasilitator diartikan sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang atau jasa.

Berdasarkan teori dari Gede Diva dengan Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana terhadap pengemis kurang berperan dengan maksimal. Masih didapatkan beberapa hambatan –hambatan dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat sebagai berikut :

1) Peran Pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang diberikan dinas sosial Kota Makassar untuk penanganan pengemis yaitu berupa tempat penampungan bagi para pengemis yang terjaring razia oleh satpol PP. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar sebagai pemeran penting dalam penyediaan sarana dan prasarana penanganan pengemis memiliki hambatan dalam hal tempat pembinaan karena pada saat ini belum tersedianya tempat pembinaan lanjutan (Panti Rehabilitasi) untuk para pengemis di Kota Makassar.

Tempat pembinaan merupakan hal yang penting untuk disediakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar karena dengan adanya tempat pembinaan para pengemis dapat diberikan pembinaan lanjutan selama enam bulan disana agar karakter serta keterampilan para pengemis dapat diasah secara maksimal dan diharapkan dengan adanya pembinaan lanjutan tersebut bisa mengurangi pengemis untuk turun ke jalan lagi mengemis.

2) Peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada pengemis

Pelatihan yang diberikan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin belum berjalan maksimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sangat minim dilakukan yaitu hanya satu kali pelatihan dalam satu tahun.

Dalam Pemberian pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan beberapa LSM. Tempat berlangsungnya kegiatan pelatihan dan pendidikan biasanya disediakan oleh pihak LSM sedangkan dari Dinas Sosial Kota Makassar hanya mengumpulkan para pengemis untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.

Lembaga pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu LPK AMI pelatihan dilaksanakan pada tahun 2019 disana para pengemis diberikan pelatihan menjahit tempat pelatihan dan alat yang digunakan untuk pelatihan disediakan oleh pihak LPK AMI sedangkan dari pihak dinas sosial Kota Makassar yang mengumpulkan para pengemis yang akan melaksanakan pelatihan. Materi selama pelatihan yaitu mulai dari cara membuat pola sampai dengan tahap akhir baju siap dipasarka. Waktu pelaksanaan pelatihan diadakan selama 15 hari.

Sedangkan pada tahun 2020 pelatihan dilakukan oleh LPK Erny's Florist disana pengemis diberikan pelatihan berupa merangkai bunga tempat pelaksanaan dan peralatan yang digunakan untuk pelatihan disediakan oleh LPK Erny's Florist sedangkan dari pihak dinas sosial Kota Makassar

mengumpulkan para pengemis yang akan melaksanakan pelatihan, pelaksanaan pelatihan diadakan selama satu hari.

Menurut Prasetyo (2014), peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penanganan pengemis, sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan jadi pemerintah harus mewadahi para pengemis dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan mereka jadi jika hal tersebut tidak terpenuhi secara maksimal maka peran pemerintah sebagai fasilitator dianggap kurang maksimal.

Peran Sebagai Regulator

Peran Pemerintah menurut Gede Diva yang kedua adalah sebagai regulator. Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur jalannya pengembangan, sehingga pengembangan dapat dijadikan landasan hukum sebagai acuannya.

Pada penelitian ini, regulator berfungsi menentukan kebijakan yang mendukung jalannya proses penanganan pengemis karena pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme penanganan pengemis. Peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan perannya sebagai regulator dengan mengacu pada penanganan pengemis menurut Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2008 tentang pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar kurang berperan hal ini dapat dilihat dengan :

- 1) Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal menangani pengemis
Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penanganan pengemis mengacu terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Makassar yaitu : Pendataan, merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Makassar melalui kegiatan pendataan tersebut Dinas Sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga dan kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi sampai dengan permasalahan pokok yang dihadapi (Nurdin, 2013).

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan selama penelitian menurut peneliti dalam hal penanganan pengemis yang hanya sekedar mendata lalu memulangkan para pengemis tindakan tersebut kurang efektif tindakan tersebut tidak akan membuat para pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya dan mereka akan kembali melakukan kegiatan mengemis.

Selanjutnya, Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di Kota Makassar. Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang

tertangkap dan sedang melakukan aktivitas pengemis maka akan dijaring dan ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil temuan peneliti pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam bentuk patroli kurang efektif karena wilayah cakupan patroli yang dilakukan tidak menyeluruh di Kota Makassar masih ada beberapa pengemis yang sudah lama melakukan kegiatan mengemis tapi tidak pernah tertangkap/terazia oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Terakhir, yaitu kampanye dan sosialisasi. Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan melalui kegiatan patroli selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat untuk tidak membiasakan memberikan uang dijalan. Kegiatan kampanye dilakukan dengan pemasangan spanduk dan baliho serta melalui mobil patroli yang di desain dengan kata-kata larangan pemberian uang terhadap pengemis.

Dinas Sosial Kota Makassar memiliki program bantuan terhadap pengemis berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,00-; setiap bulan tetapi bantuan ini terkhusus hanya diberikan terhadap pengemis eks kusta saja, akan tetapi pemberian bantuan belum merata diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar karena masi ada pengemis eks kusta yang tidak mendapatkan bantuan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengemis. Seharusnya dari dinas sosial Kota Makassar memberikan bantuan terhadap pengemis secara lebih merata lagi.

Menurut Sari (2020), salah satu hal yang membuat belum berperan sepenuhnya pemerintah dalam penanganan pengemis dikarenakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran mengemis tidak membuat jera pengemis karena kurang tegasnya peraturan yang diberikan dan kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis.

2) Peran pemerintah dalam menurunkan jumlah pengemis di Kota Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa berdasarkan hasil patroli gepeng yang terjaring dari tahun 2018-2020 terjadi kenaikan jumlah gepeng yang terjaring. Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 68 orang dan 2020 naik sebanyak 138 orang. Tahun 2020 merupakan tahun terbanyak pengemis yang terjaring razia hal tersebut dikarenakan wabah covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan dan memilih untuk turun jalan mengemis.

Berdasarkan hasil patroli gepeng yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dapat disimpulkan bawa Dinas Sosial Kota Makassar tidak mampu mengurangi jumlah gepeng yang ada di Kota Makassar.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran Pemerintah menurut Gede Diva yang terakhir yaitu sebagai katalisator. Katalisator berasal dari kata katalis yang artinya zat yang dapat mempercepat suatu

reaksi kimia. Namun dalam konteks peran, Katalisator diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan. Pengertian dari peran pemerintah yang efektif menurut Gede Diva adalah keterlibatan pemerintah dari proses penanganan pengemis. Peran pemerintah sebagai katalisator sudah berperan dalam penanganan pengemis dapat dilihat dengan :

1) Peran Pemerintah dalam melakukan koordinasi multi pihak

Menurut PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Pasal 1 ayat (1), koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga seperti YKP2N untuk menangani pengemis yang ketahuan memiliki masalah keterkaitan dengan narkoba. Jadi dari pihak dinas sosial mengumpulkan pengemis yang terindikasi menggunakan narkoba lalu menyerahkan mereka ke YKP2N untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya YKP2N melakukan assessment untuk memilih para pengemis yang harus di rehabilitasi berdasarkan tingkat keparahan penggunaan narkoba jika tingkat keparahan penggunaan tinggi akan di lakukan rehabilitasi sedangkan jika tingkat keparahan rendah atau masih tergolong penggunaan awal hanya dilakukan edukasi dari pihak YKP2N setelah itu dipulangkan.

Serta bekerjasama dengan lembaga pelatihan dalam hal pemberian pelatihan terhadap pengemis yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu bekerjasama dengan LPK AMI memberikan pelatihan menjahit kepada pengemis dan pada tahun 2020 bekerjasama dengan Erny'S Florist memberikan pelatihan merangkai bunga kepada para pengemis.

2) Peran pemerintah dalam mengembangkan sistem pemberdayaan pengemis

Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam pemberdayaan pengemis mengacu pada peraturan daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar yang dilaksanakan dalam bentuk Program-programnya berupa: pelatihan keterampilan jika pengemis berasal dari Kota Makassar maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial yang bekerjasama dengan bebera LSM dan Jika pengemis berasal dari luar daerah, maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial terkait, penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan Satpol PP dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis, penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di pinggir jalan atau di lampu merah, merujuk pengemis yang berasal dari luar kota Makassar kepada instansi terkait, dan penyerahan pengemis kepada keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

Makassar sebagai pemberi arahan kepada keluarga untuk memperingatkan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Faktor Internal dan Eksternal maraknya pengemis di Kota Makassar

Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pengemis di Kota Makassar menurut hasil pengamatan peneliti, penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dalam keadaan individu yang mendorong mereka untuk menggelandang dan mengemis. Untuk faktor eksternal sendiri mencakup lingkungan. Lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1) Faktor Internal

a. Merantau dengan modal nekad

Dari pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, ada beberapa dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memikirkan kemampuan mereka atau modal yang mereka miliki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa pengemis yang nekad datang ke Kota Makassar untuk mencari pekerjaan namun pada akhirnya menjadi pengemis karena kurangnya kemampuan dan tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

b. Malas berusaha

Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian orang menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu berdasarkan hasil penelitian malas berusaha merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi pengemis.

Ada beberapa pengemis yang menyatakan mereka sudah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan uang tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya mereka mencoba menjadi pengemis dan pendapatan yang mereka peroleh bisa membantuh untuk membiayai keperluan mereka sehingga menyebabkan mereka menjadi pengemis dan malas untuk melakukan usaha atau mencari pekerjaan lainnya.

c. Disabilitas fisik/cacat fisi

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi pengemis dibandingkan kerja disebabkan sulitnya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahap hidup dengan cara menjadi pengemis.

2) Faktor Eksternal

a. Tidak adanya lapangan kerja

Berdasarkan keterangan hasil wawancara tidak adanya lapangan pekerjaan bisa membuat seseorang menjadi pengemis akibat sulit mencari pekerjaan apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah

yaitu menjadikan meminta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan ditambah lagi terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

b. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Berdasarkan temuan hasil penelitian ada beberapa pengemis merupakan orang yang tidak mampu dan tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi sehingga menjadi pengemis sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi membuat segilintir orang memilih untuk menjadi pengemis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar kurang berperan dalam penanganan pengemis di Kota Makassar dari ketiga indikator yang peneliti gunakan untuk melihat peran Dinas Sosial Kota Makassar hanya indikator katalisator yang berjalan maksimal sedangkan indikator fasilitator dan regulator kurang berperan secara maksimal dalam penanganan pengemis. Hal utama yang menyebabkan peran Dinas Sosial kurang berperan secara maksimal dalam penanganan pengemis adalah belum adanya panti rehabilitasi lanjutan untuk para pengemis mendapatkan pembinaan serta kurangnya pelatihan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis. Adapun faktor internal dan eksternal penyebab maraknya pengemis di Kota Makassar berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti faktor internal yaitu merantau dengan modal nekad, malas berusaha dan disabilitas fisik/cacat fisik dan faktor eksternal yaitu tidak adanya lapangan kerja, dan kemiskinan serta terlilit masalah ekonomi yang akut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, F. (2018). *Peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap*. Universitas Islam Riau.
- Arifin, M. S. (2017). *Pengemis dan penanganannya di Kota Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230–241.
- Budiman, S. G. (2019). *Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Studi Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

- Diva, G. (2009). Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. *Jakarta: Bakrie School of Management*.
- Jamal, J., Suaib, E., & LISPAWANDI, A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menerapkan Pengamanan dan Ketertiban di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *E-JKPP*, 6(3).
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Murdani, M., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152–157.
- Mustafa, A. (2021). Implementasi Pasal 504-505 Kuhp dan Perda No. 2 Tahun 2008 terhadap Pembinaan Tunawisma di Kota Makassar. *Al-Risalah*, 21(1), 60–75.
- Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar*.
- Prasetyo, H. (2014). *Peran Pemerintah dalam Upaya Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Kotagede berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010*. Universitas Gadjah Mada.
- Sari, N. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Banjarbaru*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal, 361.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Zalukhu, N. N. (2021). *Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)*.